



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INDONESIA

TATA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN DESENTRALISASI

JANUARI 2008



Photo: USAID/ M Khoifan

Masyarakat melaksanakan hak pilihnya pada Pilkada yang pertama kali diselenggarakan untuk memilih gubernur propinsi NAD secara langsung.

TANTANGAN

Bertahun-tahun tata

pemerintahan yang sentralistik dan otoriter sampai tahun 1998 telah memperlemah lembaga demokrasi dan ketidaksiapannya untuk melaksanakan reformasi yang sesungguhnya

Partai-partai politik belum dapat menyediakan saluran yang demokratis dan efektif untuk memenuhi tuntutan pendukungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang besar seperti korupsi dan konflik menambah kekecewaan masyarakat

Pemulihan pasca tsunami dan mata pencaharian masyarakat di propinsi NAD menjadi tantangan jangka panjang dan sekaligus membuka kesempatan-kesempatan baru bagi bangsa Indonesia

GAMBARAN UMUM

Dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggung jawab, menanggapi konflik dan mendorong keberagaman serta mengkonsolidasi reformasi yang demokratis pada tingkat nasional, pemerintah Amerika Serikat telah menyediakan bantuan \$129 juta untuk program 5 tahun (2004-2008).

PROGRAM-PROGRAM

Mengurangi Konflik dan Mendukung Perdamaian

USAID merupakan donor utama yang memberi bantuan untuk program yang mendukung upaya-upaya mengurangi kekerasan secara sosial dan meningkatkan upaya-upaya pengembangan perdamaian di daerah-daerah yang terimbas konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku, Sulawesi Tengah. Melalui program Support for Peaceful Democratization (SPD) dan rencana program baru SERASI, USAID juga mendukung pengembangan pendekatan konflik yang sensitif; pengembangan kemampuan teknik; pengembangan mata pencaharian; mengakomodasi usulan-usulan dari masyarakat dan akademis dalam pembuatan perundang-undangan dan memberi bantuan dalam masa transisi bagi mereka yang terimbas konflik.

Reformasi Sektor Peradilan

Melalui program Justice Sector Reform Program (JSRP) dan Democratic Reform Support Program (DRSP), USAID memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada hakim, jaksa dan pegawai Mahkamah Konstitusi dan Kantor Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengembangkan bagian peradilan Negara yang lebih efektif, professional, transparan, bertanggungjawab, dan mandiri.

Penguatan Legislatif

USAID memberikan dukungan kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta kepada lebih dari 60 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Kegiatan program ini mencakup dukungan untuk penguatan penjangkauan konstituensi dan media; pengembangan kemampuan dalam membuat dan menganalisa undang-undang dan anggaran operasional serta penguatan terhadap badan dan komisi-komisi di legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Penguatan Tata Pemerintahan Daerah dan Dukungan pada Proses Desentralisasi

The Local Governance Support Program (LGSP) mendukung kebijakan desentralisasi Indonesia melalui bantuan kepada pemerintah daerah agar menjadi lebih demokratis dan kompeten dalam melaksanakan tugas utamanya di bidang tata pemerintahan daerah; lebih mampu dalam memberikan pelayanan publik dan pengelolaan sumber-sumber daya. Di lebih dari 60 kabupaten/kota, LGSP memberikan bantuan teknis dan pengembangan kemampuan pemerintah daerah, DPRD, Lembaga Masyarakat Madani, Media dan masyarakat dalam perencanaan strategis, perencanaan partisipatif, penganggaran, akuntansi dan manajemen sistem untuk pelayanan publik. Di tingkat pusat, LGSP memberi dukungan dalam rangka perbaikan pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DRSP yang mendukung kebijakan desentralisasi di tingkat pusat.



TATA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN DESENTRALISASI

TUJUAN

Memperkuat reformasi yang demokratis di tingkat pusat

Meningkatkan tata pemerintahan daerah yang partisipatif, efektif, dan akuntabel

Menangani konflik dan mendorong keberagaman

KONTAK INFORMASI

jakarta-info@usaid.gov

PRESS AND OUTREACH

Leslie Rose

Outreach and Communication Officer

USAID/Indonesia Program Office

Tel: (021) 3435-9424

lrose@usaid.gov

<http://indonesia.usaid.gov>

Pemilihan dan Proses Politik

USAID telah memulai sebuah program dukungan bagi pelaksanaan pemilihan presiden dan Pemilihan Umum (PEMILU) legislative tahun 2009 mendatang. Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional, program bantuan ini mencakup: pengembangan partai politik; administrasi PEMILU; pendidikan pemilih; pemantauan dan pengawasan PEMILU; dan penguatan kerangka undang-undang PEMILU.

Meningkatkan Budaya Demokratis

Melalui program baru yang disebut "RESPECT", USAID akan berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani serta Institusi Pemerintah dalam mendukung budaya masyarakat demokratis yang menghormati perbedaan dan keberagaman agama, hak-hak perempuan serta kelompok minoritas. Kegiatan dalam program ini akan mencakup pendidikan masyarakat madani, advokasi, pengikutsertaan tokoh-tokoh tradisional, pembentukan jaringan untuk mendukung toleransi dan keberagaman serta membantu pemerintah dalam meninjau kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan standar hak azasi.

HAL-HAL YANG TELAH DICAPAI

Program Rekonstruksi dan Pemulihan Dampak Tsunami

Disamping program LGSP, program Pemulihan Masyarakat berbasis Komunitas atau Community-Based Recovery Initiative (CBR) juga dilaksanakan di 56 desa di Nanggroe Aceh Darussalam. Program ini dimaksudkan untuk mendukung komunitas desa dalam hal pemulihan kondisi sosial, sarana dan prasarana kearah perencanaan masa depan dan pemulihan mata pencaharian. Selain dana dari USAID, program CBR didukung oleh oleh ConocoPhillips, ExxonMobil, Unocal atau Chevron dan AmeriCares sekitar US\$5 juta, dalam bentuk kerjasama "Public-Private Partnership".

Dukungan Terhadap Proses Perdamaian Aceh

Bantuan USAID ditujukan untuk mendukung keberhasilan dan keberlangsungan "Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)" pada tanggal 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik berkepanjangan lebih dari 30 tahun. Kegiatan program ini mencakup: dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah 2006 (termasuk proses politik daerah, pendaftaran pemilih, dan komisi pemilihan daerah); dukungan penyampaian informasi umum kepada masyarakat; dukungan kepada Multi-Stakeholder Forum yang didirikan oleh pemerintahan daerah; bantuan dalam pembuatan Undang-undang dan dialog publik mengenai Undang-undang Pemerintahan Aceh; pembentukan forum yang mempertemukan mantan aktifis GAM, pemerintah dan masyarakat sipil yang terimbas konflik.

Pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

USAID menyediakan bantuan teknis khususnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pansus DPR selama pembuatan hingga disyehkannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). DPR RI mensyahkan UU PTPPO pada tanggal 20 Maret 2007 dan undang-undang tersebut ditandatangani oleh President RI pada bulan April 2007.